

Peningkatan Kapasitas Berjenjang Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sanitasi Permukiman

Mohammad Debby Rizani¹, Teguh Imam Rahayu²

¹Universitas PGRI, Semarang

²Universitas Sultan Fattah, Demak

*Email corresponding author: dbyrizani@gmail.com

Abstrak: Masih adanya pemerintah daerah yang belum mensinkronkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya serta menginternalisasikan dalam proses perencanaan dan sekaligus menjadikannya sebagai mesin penggerak pembangunan sanitasi dalam mencapai target pembangunan sanitasi. Dalam rangka mewujudkan peran pemerintah daerah serta upaya menutup gap pengelolaan sanitasi pada kegiatan implementasi dokumen SSK, maka perlu ada satu metode pendampingan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Adapun metode yang digunakan adalah metode *blended learning*. Metode *blended learning* merupakan kombinasi empat metode belajar, yaitu: pelatihan termoderasi, *e-learning*, *buddy system* dan pendampingan teknis. Tujuan pembelajaran dijabarkan secara bertahap mulai dari level pemahaman awal hingga level pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta serta dirumuskan sesuai substansi yang akan diajarkan, terukur, singkat, dan jelas. Pembelajaran melalui webinar membantu proses diseminasi pengetahuan dalam skala besar karena adanya fitur *recorded webinar*, dan dapat diakses oleh audiens yang tidak mengikuti webinar. Hasil dari kegiatan bahwa sosialisasi jadwal webinar harus dilakukan secara aktif agar audiens mengetahui jadwal webinar yang akan diselenggarakan. Metode *blended learning* sangat efektif membantu proses *transfer knowledge* dan pemahaman serta dapat memotivasi peningkatan kapasitas pengelola sanitasi di daerah.

Kata Kunci: peningkatan kapasitas, pemerintah daerah, pengelolaan sanitasi

Abstract: *Some local governments have not synchronized the Sanitation Strategy District (SSD) document with other regional development planning documents. Local governments have also not yet internalized the planning process and at the same time have made it an engine for sanitation development in achieving sanitation development targets. In order to realize the role of local government and efforts to close the sanitation management gap in the SSD document implementation activities, there needs to be a method of assistance in the form of increasing the capacity of local government officials. the method applied is the blended learning method. The blended learning method is a combination of four learning methods, namely: moderated training, e-learning, buddy systems and technical assistance. Learning objectives are described in stages starting from the initial level of understanding to the level of understanding that the participants want to achieve and formulated according to the substance to be taught, measurable, concise, and clear. Learning through webinars helps the process of knowledge dissemination on a large scale because it is supported by the recorded webinar feature and can be accessed by audiences other than webinar participants. The result of the activity is that the socialization of the webinar schedule must be carried out actively so that the audience knows the schedule of the webinar to be held. The blended learning method is very effective in helping the process of transferring knowledge and understanding of the participants and motivating the improvement of the capacity of sanitation managers in the regions*

Keywords: (Candara, 9,5 pt, italic) *abstract guideline; italic; method* (normal font, 3-5 words)

Pendahuluan

Menurut Hopkins (1939) dikutip oleh Craven et al. (2013), sanitasi lingkungan merupakan pengawasaan terhadap faktor-faktor lingkungan yang memberi pengaruh terhadap kesehatan manusia. Pembangunan sanitasi menurut Soeranto (2004) dalam Rizki et al. (2007) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu pembangunan bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan

persampahan dan saluran drainase. Dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 disebutkan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

Data capaian akses sanitasi (air limbah) layak sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 77,44% (termasuk 7,5% aman), hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah dan masyarakat dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 90% akses sanitasi layak (termasuk 15% aman). Di sektor persampahan, capaian rumah tangga di wilayah perkotaan dengan sampah terkelola di tahun 2016 sebesar 59,08% penanganan dan 1,55% pengurangan, sementara Pemerintah Indonesia menargetkan angka ini akan mencapai penanganan dan 20% pengurangan di wilayah perkotaan pada tahun 2024. Banyak daerah sudah memanfaatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai dokumen acuan/sumber untuk proses perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum mensinkronkan SSK-nya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya serta menginternalisasikan dalam proses perencanaan dan menjadikannya sebagai mesin penggerak pembangunan sanitasi di daerah dalam mencapai target pembangunan sanitasi diatas.

Dalam rangka mewujudkan peran pemerintah daerah serta upaya menutup gap pengelolaan sanitasi pada kegiatan implementasi dokumen SSK, maka perlu ada satu metode pendampingan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Adapun metode yang digunakan adalah metode *blended learning*. Secara garis besar, metode *blended learning* ini menggunakan pendekatan Revisi Taksonomi Bloom (Anderson. LW; Krathwohl. DR, 2001) yang berfokus pada dimensi proses kognitif. Metode *blended learning* yang merupakan kombinasi dari empat metode belajar untuk digunakan sebagai kerangka kerja peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Adapun empat metode belajar tersebut adalah pelatihan termoderasi (tatap muka), *e-learning*, *buddy system* dan pendampingan teknis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis telah melakukan pengabdian berbasis penelitian melalui kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas Pokja Sanitasi/PPAS/AMPL dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah pada pelaksanaan implementasi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen SSK. Pelaksanaan implementasi dokumen SSK merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengelolaan sanitasi di daerah yang aman, sehat dan berkelanjutan.

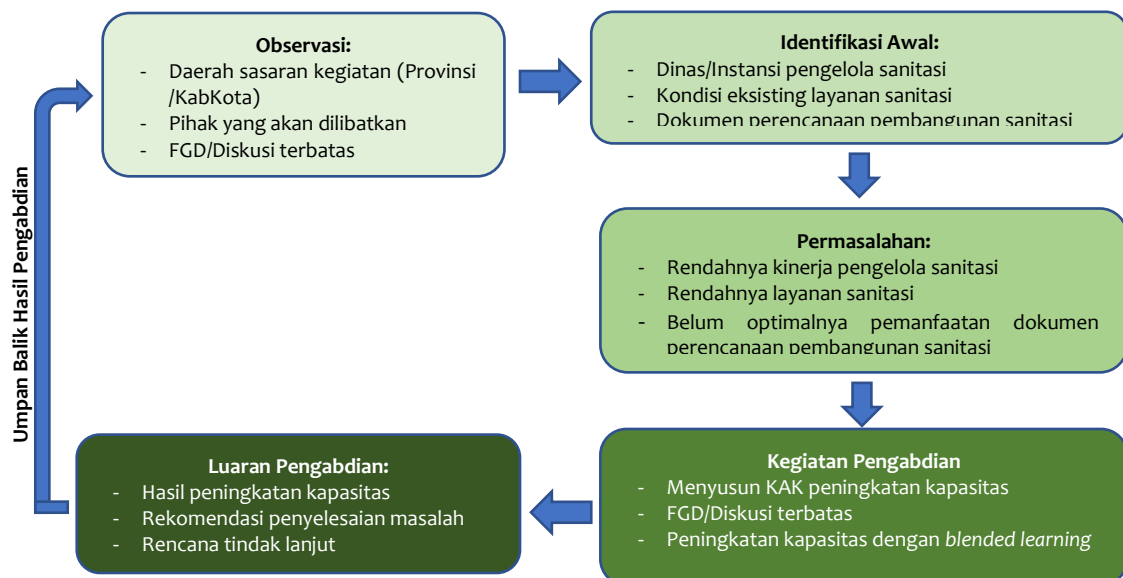
Metode

Metode *blended learning* ini memadukan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan kapasitas yang konvensional (tatap muka), yang selanjutnya dikenal sebagai metode belajar. Terdapat empat metode belajar yaitu pelatihan tatap muka, *e-learning*, *buddy system*, dan pendampingan teknis. Sepanjang proses pendampingan peningkatan kapasitas, proses *assessment* dilakukan untuk mengetahui perkembangan level pemahaman setiap individu yang terlibat sebagai pengguna *blended learning* berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom (RTB). Oleh karena itu, terdapat “Instrumen Pemetaan Kompetensi Individu” sebagai perangkat penilaian.

Untuk kepentingan peningkatan kapasitas, taksonomi digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional, seperti tujuan pembelajaran yang digolongkan dalam tiga klasifikasi umum atau

ranah (domain), yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor (Prasetya, 2012). Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual. Ranah afektif adalah kemampuan yang berkenaan dengan perasaan, emosi, sikap/ derajat penerimaan atau penilaian suatu obyek. Ranah psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (*skill*) dan kemampuan bertindak individu. Taksonomi Bloom ranah kognitif merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Taksonomi Bloom lebih ditujukan untuk tenaga pengajar di universitas seperti dosen. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 melakukan Revisi Taksonomi Bloom. Revisi Taksonomi Bloom ini bersifat lebih luas menjangkau seluruh pelaku dalam dunia pendidikan (Gunawan;Palupi, 2012)

Metode *blended learning* digunakan pada peningkatan kapasitas aparatur pemda (Pokja Sanitasi/PPAS) dengan menggunakan pendekatan Revisi Taksonomi Bloom (RTB) yang berfokus pada ranah kognitif yakni: mengingat (*remember*), memahami (*understand*), mengaplikasikan (*apply*), menganalisa (*analyze*), mengevaluasi (*evaluate*), dan menciptakan (*create*).



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Sumber: Peneliti, 2021

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan menggunakan metode *blended learning* dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan termoderasi, e-learning, buddy system dan pendampingan teknis. Kegiatan pelatihan termoderasi merupakan salah satu metode yang melibatkan moderator dan/atau narasumber/fasilitator kelas untuk memberikan materi ajar terhadap audiens baik melalui daring atau luring. Diawali dengan kegiatan *Training of Trainer (ToT)* calon fasilitator kelas dan assessor. Metode kelas daring dilaksanakan sebagai pengganti pelatihan tatap muka untuk kegiatan ToT bagi calon narasumber yang berasal dari unsur Bappenas (PMU), Kementerian PUPR (PIU-T), Kementerian Kesehatan (PIU-AE) dan Kementerian Dalam Negeri (PIU-KP).

Tabel 1. Ruang Lingkup Pelatihan Termoderasi Pengelola Sanitasi

Kegiatan	Penyelenggara *)	Sasaran (Audiens)	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan**)
Pelatihan bagi Pelatih/ <i>Training of Trainer</i> PPSP	Pusat (PMU), didukung tenaga ahli pusat	PMU PIUs	Pelatihan yang ditujukan untuk PMU PIU agar dapat mengorganisir, memfasilitasi, serta memberikan bimbingan teknis PPSP bagi pokja provinsi dan fasilitator implementasi	Dilaksanakan pada awal Tahun N, Januari-Februari
Lokakarya Penguatan Peran Provinsi PPSP	Pusat (PMU), didukung tenaga ahli pusat	Pokja Provinsi	Pelatihan yang ditujukan untuk pokja provinsi agar dapat mengorganisir, memfasilitasi, serta memberikan bimbingan teknis bagi pokja kabupaten/kota (dan fasilitator kabupaten/kota) dalam penyusunan/pemutakhiran dan pendampingan implementasi SSK	Dilaksanakan pada awal Tahun N, Maret-April
Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat (PIU T), jika sasaran utama fasilitator provinsi • Provinsi, jika sasaran utama fasilitator kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator Provinsi • Fasilitator Kabupaten/Kota 	Pelatihan yang ditujukan untuk fasilitator agar dapat mengorganisir dan memfasilitasi pokja provinsi dan pokja kabupaten/kota dalam penyusunan/pemutakhiran dan pendampingan implementasi SSK	Dilaksanakan pada awal Tahun N, Maret-April
Pelatihan <i>Environmental Health Risk Assessment</i> (EHRA)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat (PIU AE), jika sasaran tim dinkes provinsi • Pokja Provinsi (Dinkes provinsi), jika sasaran utama dinkes kabupaten/kota 	Tim Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota	Pelatihan bagi pelatih EHRA tingkat Provinsi bertujuan agar Provinsi mampu mengorganisir dan melatih kab/kota di wilayahnya untuk melakukan survey EHRA sesuai panduan dan instrumen pengolahan data terbaru.	Dilaksanakan pada awal tahun N, Pebruari-Maret

Sumber: Penulis, 2021

Keterangan:

*) Pelatih/fasilitator kelas merupakan individu yang telah tersertifikasi sebagai *associate assessor* dan *assessor*.

***) waktu pelaksanaan yang ideal, dapat disesuaikan jika terjadi kondisi abnormal.

Peserta ToT melakukan kegiatan belajar mandiri melalui kursus *e-learning* pada web Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Nasional/*National Water and Sanitation Service System* (NAWASIS) dan mengerjakan *pre test*. Kemudian peserta mengikuti kelas daring utama sebanyak 7 sesi dan daring tambahan yang didesain dengan format diskusi terarah untuk pembahasan tugas praktek sebanyak 4 sesi. Dari 33 peserta yang telah selesai mengikuti rangkaian peningkatan kapasitas, terdapat enam peserta yang teridentifikasi mencapai kualifikasi *co-fasilitator kelas* (level mengaplikasikan) dan enam lainnya mencapai kualifikasi *assessor/fasilitator kelas utama* (level menganalisa-mengevaluasi-menciptakan). Dari hasil tersebut, maka para peserta yang terqualifikasi sebagai *assessor* tersebut telah dinilai mampu melakukan fasilitasi dalam kelas kepada pemerintah daerah dan melakukan penilaian kognitif individu melalui peningkatan kapasitas di pusat dan daerah.

Tabel 2. Definisi Kursus *E-Learning*

Definisi	Fokus pencapaian level kognitif	Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan secara mandiri (audiens memiliki kebebasan dalam menentukan waktu untuk belajar) ✓ Materi yang diajarkan/dilatihkan bersifat umum bagi semua kalangan target sasaran/audiens ✓ Contoh: Kursus Pembangunan Sanitasi Permukiman (2020) yang meliputi dua modul yaitu Panduan Fasilitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Manual Pengelolaan Program PPSP 2020-2024 	Mengaplikasikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibel, karena dapat diakses kapanpun oleh pengguna dan dapat diakses jika dibutuhkan ▪ Menghemat biaya operasional ▪ Dapat menjangkau audiens/pengguna yang lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya interaksi langsung antara pengguna dengan pemateri sehingga apabila terdapat pertanyaan dari pengguna mengenai substansi, pertanyaan tersebut tidak bisa segera ditanggapi ▪ <i>e-learning</i> tidak dapat diakses jika daerah pengguna tidak terhubung dengan jaringan internet

Sumber: Penulis, 2021

Berbeda dengan pelatihan tatap muka atau kelas daring, webinar biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu seperti sebulan dua kali dengan tujuan membantu audiens memahami suatu hal yang bersifat adendum pada sebuah kebijakan atau inovasi baru yang dilakukan pemerintah daerah dan mitra pembangunan sanitasi. Webinar dilakukan sebanyak 13 kali dengan rincian: 7 webinar bertujuan untuk sosialisasi substansi panduan fasilitasi pembangunan permukiman dan petunjuk teknisnya, 6 webinar bertujuan berbagi pengalaman baik dari daerah dengan keberhasilan pengelolaan sanitasi daerah yang dihadiri oleh narasumber dari Pokja Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengelola menu *e-learning* ini dikoordinir oleh PMU dengan keterlibatan PIU PPSP dan mitra kolaborator. Pusat sebagai pengelola *e-learning* berperan dalam penyusunan atau pemutakhiran materi, mempublikasikannya dalam bentuk kursus pada *e-learning*. Provinsi juga memiliki peran dalam mendampingi kabupaten/kota dalam kegiatan peningkatan kapasitas, maka Pusat dapat memberikan rekapitulasi data administrasi kursus ini kepada provinsi seperti rekapitulasi nilai tes daring dan progres belajar kursus yang dilakukan oleh kabupaten/kota untuk kepentingan penilaian kognitif individu. Secara garis besar, kursus belajar *e-learning* terdiri dari tiga hierarki (tingkatan) yaitu: kursus, modul dan materi. Penyusunan/pemutakhiran substansi kursus *e-learning* ini dilakukan minimal setahun sekali pada awal tahun N atau akhir tahun N-1.

Buddy system merupakan metode yang menekankan proses pembelajaran horizontal antar daerah yang dimoderasi oleh moderator. Materi yang didiskusikan melalui metode ini dapat bersifat umum atau spesifik. *Buddy system* dapat berupa forum diskusi daring pada NAWASIS, interaksi informal melalui telepon/aplikasi pesan/*video call*, dan kegiatan yang bersifat *mentoring* antar kabupaten/kota yang dijelaskan secara detail pada Tabel 3

Tabel 3. Deskripsi Buddy System

Definisi	Fokus pencapaian level kognitif	Kelebihan	Kekurangan
<p>Forum diskusi NAWASIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Moderator merupakan pemerintah pusat sesuai spesialisasinya (contoh: jika topik diskusi mengenai aspek teknis seperti pemetaan profil sanitasi, maka PIU T berperan sebagai moderator) ✓ Moderator hanya mengarahkan jalannya diskusi, namun semua anggota forum berkontribusi dalam menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di diskusi 	Memahami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibel, karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna dan dapat diakses jika dibutuhkan ▪ Catatan diskusi terdokumentasikan melalui sistem secara otomatis sehingga hasil diskusi dapat direkapitulasi untuk kepentingan lainnya (misalnya penyelenggaraan webinar berdasarkan isu terkini dari bahasan diskusi pada forum) ▪ Menjangkau audiens/pengguna yang lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interaksi yang terjadi terkadang kurang spontan karena terkadang tidak semua anggota forum rutin mengecek diskusi pada forum ▪ Forum tidak dapat diakses jika daerah pengguna tidak terhubung dengan jaringan internet
<p>Interaksi informal melalui aplikasi pesan/video call/ telepon:</p> <p>A. Diskusi kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Media grup aplikasi pesan atau video call berkelompok sangat cocok digunakan jika diskusi yang dilakukan secara berkelompok. <ul style="list-style-type: none"> ○ Jika melibatkan antar provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota yang berada di lingkup di provinsi yang berbeda, maka moderatornya ialah Pusat (sesuai spesialisasi atau tupoksi yang tertera pada MMP) ○ Jika melibatkan antar kabupaten/kota yang berada di lingkup di satu provinsi yang sama, maka moderatornya ialah Provinsi tersebut (sesuai spesialisasi atau tupoksi yang tertera pada MMP) ✓ Topik diskusi dapat bersifat umum <p>B. Diskusi personal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jika diskusi hanya dilakukan tidak berkelompok (hanya 2 pihak) dengan level yang sejajar (seperti sesama kabupaten/kota atau sesama provinsi), maka diskusi tersebut tidak memerlukan moderator. ✓ Topik diskusi bersifat spesifik 	Memahami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibel, karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna dan dapat diakses jika dibutuhkan (terutama melalui grup aplikasi pesan dan telepon) ▪ Interaksi yang terjadi biasanya spontan sehingga pihak yang bertanya mendapatkan jawabannya saat itu juga ▪ Jika dilakukan melalui video call, maka catatan diskusi dapat terekam melalui rekaman ulang sehingga dapat diakses kembali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika diskusi kelompok terjadi melalui grup aplikasi pesan, seringkali diskusi yang berjalan (terutama dalam grup aplikasi pesan) terhenti karena adanya distraksi pesan dari anggota yang tidak berkaitan di tengah diskusi (sulit direkapitulasi dinamika dan bahasan diskusinya)

Definisi	Fokus pencapaian level kognitif	Kelebihan	Kekurangan
<p>Kegiatan bersifat mentoring antar kabupaten/kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memerlukan moderator: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jika melibatkan antar provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota yang berada di lingkup di provinsi yang berbeda, maka moderator merupakan pemerintah pusat sesuai spesialisasinya dengan/tanpa keterlibatan mitra kolaborator lainnya seperti K/L lainnya, LSM atau lembaga donor ○ Jika melibatkan antar kabupaten/kota yang berada di lingkup di satu provinsi yang sama, maka moderatornya adalah Provinsi tersebut ✓ Moderator hanya mengarahkan jalannya diskusi dan mengorganisir kegiatan mentoring, sedangkan pemateri ialah mentor (kabupaten/kota) tersebut ✓ Dilakukan secara berpasangan (satu mentor dapat dipasangkan dengan satu mentee atau dua mentee) ✓ Topik diskusi didesain spesifik dan aplikatif bagi mentee ✓ Dapat dilakukan secara luring (studi banding) atau daring (<i>video call</i>) 	Mengaplikasikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan kebutuhan mentee dan praktikal bagi mentee ▪ Mendorong kolaborasi antar pemerintah ▪ Mendorong replikasi praktik baik dari suatu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika partisipasi mentee tidak aktif, maka proses optimal yang terjadi tidak dapat optimal ▪ Membutuhkan biaya operasional, jika kegiatan ini dilakukan secara luring (studi banding) ▪ Hasil yang didapat tidak instan, membutuhkan proses

Sumber: Penulis, 2021

Selain kursus *e-learning*, NAWASIS juga menyediakan platform forum. Pengguna forum harus melakukan registrasi akun pada NAWASIS terlebih dahulu. Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam *buddy system* dengan adanya diskusi informal yang dilakukan secara personal atau berkelompok dengan menggunakan aplikasi pesan seperti *Whatsapp group/Telegram group* atau melalui *video call* dengan memanfaatkan *Zoom, Google Meet*, dan lain-lain. Replikasi cerita sukses dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan bersifat mentoring (*horizontal learning*) antar kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan mentoring ini dilakukan dengan memanfaatkan pendanaan secara mandiri sesuai kesepakatan antar kabupaten/kota yang terlibat atau berkolaborasi dengan mitra lainnya.

Pendampingan Teknis merupakan metode yang digunakan apabila materi yang dilatihkan bersifat kompleks dan spesifik. Aplikasi pendampingan teknis pada konteks PPSP adalah *coaching clinic* dan konsultasi melalui *video call* yang dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Deskripsi Pendampingan Teknis

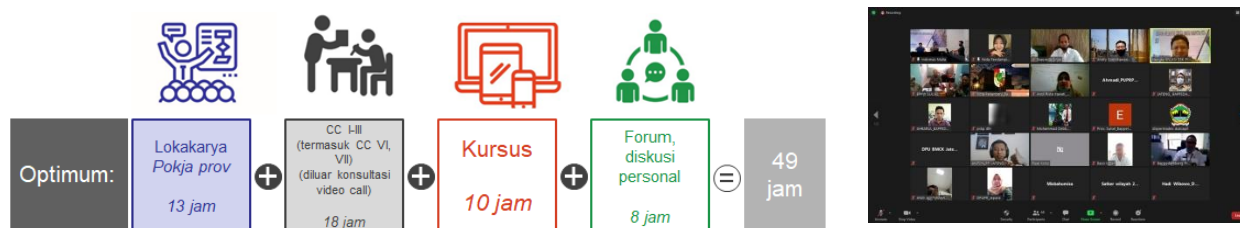
Definisi	Fokus pencapaian level kognitif	Kelebihan	Kekurangan
<p><i>Coaching Clinic</i> (luring):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya interaksi secara langsung (<i>real-time interaction</i>) dan dilakukan secara bertatap muka ✓ Dimoderasi oleh moderator ✓ Materi yang diajarkan/dilatihkan bersifat spesifik bagi sebagian target sasaran/peserta dan dipadatkan dalam beberapa sesi pada kurun waktu tertentu ✓ Dilakukan setelah kriteria kesiapan provinsi dan kabupaten/kota terpenuhi ✓ Contoh: <i>Coaching clinic I-VII Implementasi SSK 2020</i> 	Menciptakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Familiar, sudah banyak dilakukan sejak PPSP-1 ▪ Tidak terpengaruh terhadap jaringan internet sehingga materi yang disampaikan tidak mengalami <i>delay</i> ▪ Materi yang diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan praktikal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang fleksibel (karena peserta harus meluangkan waktunya untuk berpegian ke tempat pelatihan) ▪ Jumlah audiens/peserta terbatas (karena mempengaruhi biaya operasional) ▪ Adanya biaya operasional seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi pelatih dan/atau peserta
<p>Daring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya interaksi secara langsung (<i>real-time interaction</i>) dan dilakukan melalui pertemuan virtual ✓ Dimoderasi oleh moderator ✓ Materi yang diajarkan/dilatihkan bersifat spesifik bagi sebagian target sasaran/peserta ✓ Dilakukan berdasarkan permintaan audiens atau tindak lanjut dari pembahasan pada pelatihan/rapat/<i>coaching clinic</i> 	Mengevaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibel (karena peserta dapat hadir dari manapun selama memiliki koneksi internet yang baik) ▪ Dapat menjangkau audiens/peserta lebih luas ▪ Menghemat komponen biaya operasional seperti biaya konsumsi dan biaya akomodasi pelatih dan/atau audiens ▪ Materi yang diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak dapat berjalan efektif jika koneksi internet pelatih/fasilitator kelas dan/atau audiens mengalami gangguan apabila dilakukan konsultasi melalui daring ▪ Untuk sebagian individu, interaksi melalui daring terasa melelahkan jika dilakukan dalam intensitas jadwal yang padat

Sumber: Penulis, 2021

Terdapat tujuh kali *coaching clinic* yang secara detail dijelaskan pada Tabel 5. Konsultasi melalui *video call* dilakukan berdasarkan permintaan atau adanya kebutuhan yang teridentifikasi dari pertemuan rapat atau pelatihan. Konsultasi dapat diselenggarakan dan dimoderasi oleh pusat dan provinsi.

Tabel 5. Kegiatan *Coaching Clinic* Pada PPSP

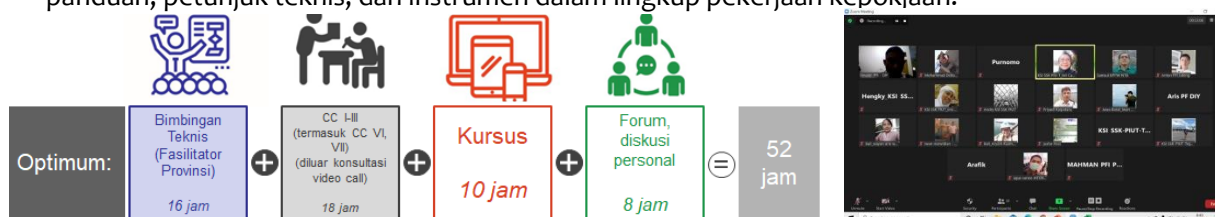
Kegiatan	Penyelenggara *	Sasaran target	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan **
<i>Coaching Clinic I dan VI</i>	Provinsi	Provinsi dan kab/kota	<i>Coaching clinic-1</i> yang ditujukan bagi audiens dalam menyiapkan materi advokasi yang ditujukan kepada kepala daerah (meliputi substansi bab II SSK yang termutakhirkan, paket kebijakan yang disusung, dan rencana prioritas) <i>Coaching clinic-6</i> ditujukan bagi audiens untuk mengevaluasi pelaksanaan replikasi implementasi skala penuh tahun N+1.	April (akhir)
<i>Coaching Clinic II</i>	Kab/Kota	kab/kota	<i>Coaching clinic</i> yang ditujukan bagi audiens untuk mendapatkan dukungan OPD dan komitmen kepala daerah	Akhir Mei- Pertengahan Juni
<i>Coaching Clinic III dan VII</i>	Provinsi	provinsi dan kab/kota	<i>Coaching clinic-3</i> yang ditujukan bagi audiens dalam menyiapkan rencana aksi multiaspek berdasarkan paket kebijakan yang telah disepakati oleh Sekda selaku ketua	Akhir Juli (sesuai siklus)



Gambar 2. Kebutuhan Waktu dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Provinsi

Sumber: Penulis, 2021

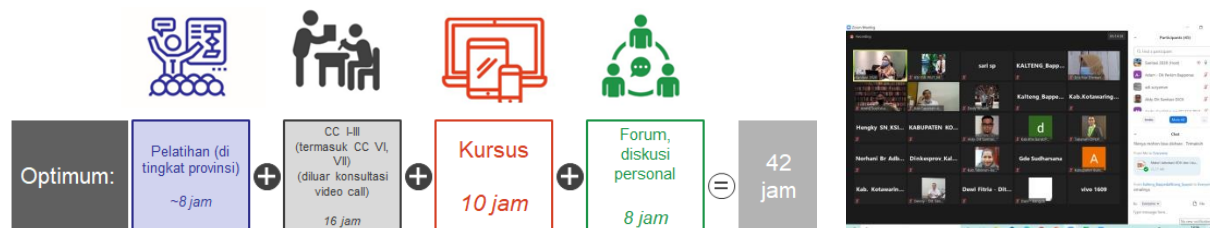
Tujuan pembelajaran optimum yang didesain bagi provinsi adalah Pokja provinsi dapat mencapai level “mengevaluasi” (*evaluate*). Hal ini dikarenakan provinsi memiliki peran dalam mengevaluasi output-output pemerintah kabupaten/kota dalam mengaplikasikan substansi panduan, petunjuk teknis, dan instrumen dalam lingkup pekerjaan kepokjaan.



Gambar 3. Kebutuhan Waktu dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Provinsi

Sumber: Penulis, 2021

Tujuan pembelajaran optimum yang didesain bagi fasilitator provinsi ialah fasilitator provinsi dapat mencapai level “mengevaluasi” (*evaluate*). Hal ini dikarenakan fasilitator provinsi memiliki peran yang sama dengan pokja provinsi dan dituntut untuk lebih menguasai semua aspek.



Gambar 4. Kebutuhan Waktu dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Kab/Kota dan Fasilitator Kab/Kota

Sumber: Penulis, 2021

Tujuan pembelajaran optimum yang didesain bagi kabupaten/kota ialah kabupaten/kota dapat mencapai level “menganalisa” (*analyze*). Hal ini dikarenakan kabupaten/kota memiliki peran dalam menganalisa hasil aplikasi yang diimplementasikan berdasarkan petunjuk dan arahan dari panduan, petunjuk teknis, dan instrumen dalam lingkup pekerjaan kepokjaan.

Alokasi waktu yang tertera pada gambar 6 sampai 9 berlaku apabila level kognitif peserta pada awal peningkatan kapasitas mencapai baru mencapai level “memahami”. Jika level awal kognitif peserta sudah melebihi level “memahami”, maka total alokasi waktu dapat berkurang dari tulisan yang tertera pada gambar. Gambar di atas tidak mengindikasikan urutan pelaksanaan kegiatan, metode belajar dapat dilakukan disesuaikan sesuai kebutuhan.

Penilaian level pemahaman individu ini akan didasarkan pada pendekatan Revisi Taksonomi Bloom, khususnya yang berfokus pada dimensi proses kognitif yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setiap individu yang mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dapat

diklasifikasikan berdasarkan skor akhir yang terhitung secara sistematis pada “Instrumen Pemetaan Kompetensi SDM”. Skor hasil akhir akan dikonversi merujuk kepada tingkatan kognitif Revisi Taksonomi Bloom. Klasifikasi kualifikasi akhir serta deskripsinya dapat dilihat pada Tabel 6.

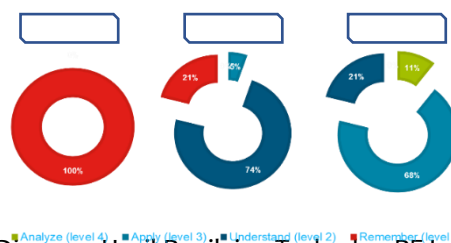
Tabel 6. Kualifikasi akhir untuk sasaran target di tingkat pusat dan provinsi

Kualifikasi	Definisi dan Peran
Assessor– Fasilitator Utama	Khusus Pusat: Menjadi tim utama dalam pemutakhiran panduan, petunjuk teknis, instrumen , dan dokumen lainnya pada tahun berikutnya.
Level kognitif: menganalisa - menciptakan	Memberikan penilaian terhadap individu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) berdasarkan hasil observasi di setiap kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan dan <i>coaching clinic</i>).
	Menjadi fasilitator kelas/pemateri/narasumber setiap topik pada setiap kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat atau daerah.
Co-Fasilitator	Menjadi asisten fasilitator/pemateri/narasumber pada setiap kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat atau daerah.
Level kognitif: mengaplikasikan	Memberikan pertimbangan dalam penilaian terhadap individu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) berdasarkan hasil observasi di kegiatan TA (<i>coaching clinic</i>) jika assessor tidak bisa hadir TA tersebut. Hasil penilaian tersebut dikomunikasikan dengan assessor
Peserta –Madya Level kognitif: memahami	Tidak memenuhi kualifikasi dalam memberikan penilaian dan sebagai fasilitator/pemateri
	Diprioritaskan menjadi peserta di kegiatan pelatihan selanjutnya dan/atau sesi pelatihan tambahan
Peserta-Pemula Level kognitif: mengingat	Tidak memenuhi kualifikasi dalam memberikan penilaian dan sebagai fasilitator/pemateri
	Harus diikutikan kembali sebagai peserta di kegiatan pelatihan selanjutnya

Sumber: Penulis, 2021

Jika peserta kegiatan *blended learning* tahun sebelumnya sudah mencapai level pemahaman yang tinggi seperti mengaplikasikan hingga menciptakan, maka mereka dapat berperan sebagai co-fasilitator hingga fasilitator/pelatih utama atau assessor pada kegiatan *blended learning* tahun berikutnya. Akan tetapi, jika terdapat peserta tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan atau masih mencapai level kognitif “mengingat” dan “memahami”, maka peserta tersebut dapat diprioritaskan untuk ditingkatkan kembali level pemahamannya pada tahun berikutnya bersama dengan peserta baru.

Sepanjang tahun 2020, penilaian level kognitif terhadap individu yang menjalani serangkaian kegiatan *blended learning* telah dilakukan, dengan sasaran 19 Fasilitator Implementasi Provinsi 2020. Penilaian dilakukan selama periode bulan Juli-Desember 2020. Komponen penilaian meliputi skor *pre test*, *post test*, skor tugas (selama pelatihan), hingga observasi assessor pusat terhadap 19 fasilitator sepanjang kegiatan pelatihan dan fasilitasi (*kick off-coaching clinic*). Berikut ini grafik pai yang menggambarkan perkembangan level kognitif PFI 2020.



Gambar 5. Diagram Hasil Penilaian Terhadap PF Implementasi

Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan diagram diatas, fasilitator mengalami peningkatan level kognitif dengan merujuk Revisi Taksonomi Bloom, sejak sebelum Bimbingan Teknis PFI hingga akhir tahun. Proses penilaian level kognitif ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan *blended learning* untuk

tahun berikutnya. Hasil penilaian individu digunakan sebagai referensi bagi pusat dalam mengeluarkan surat rekomendasi bagi fasilitator-fasilitator yang mengalami peningkatan level kognitif secara signifikan dan mencapai level kognitif yang ditentukan.

Kesimpulan

Kegiatan peningkatan kapasitas dengan metode blended learning telah dilaksanakan dan dari hasil analisa, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Tujuan pembelajaran dijabarkan secara bertahap mulai dari level pemahaman awal hingga level pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta serta dirumuskan sesuai dengan substansi yang akan diajarkan, terukur, singkat, dan jelas. Agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, total alokasi waktu dari bauran empat metode belajar menjadi hal yang harus diperhatikan.
2. Webinar membantu proses diseminasi pengetahuan kepada audiens skala besar karena adanya fitur *recorded webinar*, yang dapat diakses oleh audiens yang tidak dapat menyaksikan webinar secara langsung. Sosialisasi jadwal webinar harus dilakukan secara aktif agar target audiens mengetahui jadwal webinar yang akan diselenggarakan.
3. Metode *blended learning* sangat efektif membantu proses *transfer knowledge* dan pemahaman serta dapat memotivasi peningkatan kapasitas pengelola sanitasi di daerah.

Penulis berharap dimasa yang akan datang terdapat pihak yang akan menindaklanjuti hasil pengabdian yang telah penulis lakukan demi tercapainya tujuan yang lebih optimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dituangkan dalam artikel dan diselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya metode *transfer knowledge* dengan mengefisienkan waktu dan pendanaan terutama pada masa pandemic covid-19.

Referensi

- Anderson. LW; Krathwohl. DR. (2001). *Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Addison Wesley Longman Inc.
- Craven, J., Giné, R., Jiménez, A., & Pérez-Foguet, A. (2013). Introducing hygiene elements into sanitation monitoring. *36th WEDC International Conference: Delivering Water, Sanitation and Hygiene Services in an Uncertain Environment*. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84891534384&partnerID=tZOtx3y1>
- Gunawan;Palupi. (2012). Taksonomi Bloom–Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 2(2), 98–117.
- Hopkins. (1939). *Elements of sanitation*. D. Van Nostrand Company, Inc.
- Prasetya, T. I. (2012). MENINGKATKAN KETERAMPILAN Meningkatkan Keterampilan Menyusun Instrumen Hasil Belajar Berbasis Modul Interaktif Bagi Guru-Guru IPA SMPN Kota Magelang. *Journal of Educational Research and Evaluation*, 1(2), 108.
- Rizki, B., & Saleh, S. (2007). Keterkaitan Akses Sanitasi dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 223–233.
- Soeranto, D. A. (2004). *Kualitas Manusia Indonesia dan Pembangunan Prasarana Sanitasi*. Media Percik.